

PARTISIPASI PEREMPUAN PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PRODAMAS) DI KELURAHAN BANJAR MELATI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Novita Kurniawati

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

Participation is one of the important components in development. Realizing the importance of equality between men and women, then the Government of Kediri made an insight on gender program with gender mainstreaming strategy namely Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS). This research used the qualitative approach with descriptive research. The technique of data collection was done through interviews, observation and secondary data. The chosen technique to determinate the informants is Purposive technique with total 23 informants. This research uses forms of participation according to Cohen and Uphoff (in Solekhan 2014) that describe the participation in some stage of development i.e., participation in decision-making, participation in the implementation, participation in the receiving benefit and participation in evaluation. This research found that women's participation in general has been running well and even improved. The intended improvement is the improvement in the ability and competence of women when compared to the previous year. The research also found that women's presence in the physical form is still low compared to that of men, but for the non-physical form in the form of both ideas and notions as well as the responsibility of the women already going pretty well. It is in accordance with the objectives of participation that is increasing the ability of each person either directly or indirectly involved in a development program.

Keyword : Participatory Planning, Women's Participation, Community Empowerment Program.

Pendahuluan

Kajian tentang perempuan selalu menarik untuk di teliti. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) mengungkapkan bahwa perempuan memiliki tiga peran penting yaitu peran reproduktif, peran produktif dan peran sosial. Ketiga peran ini sangat penting, namun dalam kenyataannya akses untuk peran produktif perempuan masih sangat sempit (www.kemenpppa.go.id).

Berbagai kendala yang dihadapi oleh kaum perempuan membuat kondisinya semakin terpuruk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 dari bidang pendidikan yang dilihat dari prosentase jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah menurut jenis kelamin, diketahui bahwa perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan yang tidak atau belum pernah sekolah lebih banyak dua kali lipat dibanding laki-laki yaitu sebesar 68% jika dibanding dengan jumlah laki-laki yang hanya sebesar 32%. Hal tersebut mengungkapkan bahwa

perempuan berada pada kondisi yang terbelakang dibanding laki-laki.

Pada bidang ketenagakerjaan, data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut kelompok jenis kelamin pada tahun 2012 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka penduduk perempuan Indonesia berumur 15 tahun ke atas pada jenis kelamin perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki. Dapat dilihat bahwa terdapat selisih prosentase tingkat pengangguran terbuka penduduk 15 tahun ke atas antara laki-laki dan perempuan yang tidak terlalu besar. Selisih prosentase tingkat pengangguran terbuka penduduk 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin adalah sebesar 1.02%. Dengan prosentase laki-laki sebesar 46% dan perempuan sebesar 54%.

Selain itu, lemahnya posisi perempuan juga dapat dilihat dari stigma dikalangan masyarakat yang mana menjelaskan bahwa perempuan hanya mampu mengerjakan urusan domestik saja yaitu mengurus

rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2014, kegiatan perempuan dalam satu minggu untuk mengurus rumah tangga cukup tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Terdapat ketimpangan yang sangat signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan mengurus rumah tangga selama satu minggu. Kegiatan yang didominasi oleh kaum perempuan dan prosentase keterlibatan laki-laki dalam kegiatan rumah tangga selama satu minggu sangatlah sedikit yaitu hanya sebesar 5%.

Sementara itu hal lain yang menunjukkan kondisi terpuruk perempuan di Indonesia juga bisa terlihat dari keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pusat yang kian hari kian menurun. Hasil pemilihan umum tahun 2009 terdapat sekitar 101 anggota DPR perempuan, namun periode saat ini, 2014-2019, hanya ada 97 perempuan dari total 560 anggota DPR. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR Ida Fauziah dalam acara *International Women Day Luncheon* 2017 di Gedung DPR/MPR yang menyebutkan bahwa:

“idealnya, partisipasi politik perempuan itu adalah pertama karena ada ketertarikan dari perempuan itu sendiri. Kedua, memang ada faktor akomodasi partai politik. Ketiga, didorong oleh regulasinya. Yang kedua dan ketiga bisa kita dorong. Yang sedang kita bangun adalah bagaimana membangun keinginan pribadi perempuan dalam politik. Ini pekerjaan berat bagi kita semua” (www.voaindonesia.com diakses 19 Oktober 2017).

Konteks perempuan dan peranannya tentu erat kaitannya dengan kodrat dan gender. Secara kodrat, perempuan sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan memiliki kelebihan luar biasa. Perempuan lebih lembut dan peka dalam menyikapi persoalan yang ada di sekelilingnya. Seiring dengan ciri khas tersebut, keberadaan perempuan semakin kurang mendapat perhatian di keluarga maupun lingkungannya. Akibatnya perempuan mengalami keterbelakangan status maupun akses dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.. Posisi ini bukan memandang kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki perempuan, melainkan semata-mata karena adanya keindahan, kecantikan wajah dan tubuh perempuan itu sendiri. Namun eksploitasi yang berlebihan terhadap kaum perempuan akan berdampak bagi generasi selanjutnya.

Gencarnya gerakan yang menyuarakan kesetaraan dan keadilan bagi kaum perempuan telah membawa dampak yang cukup memuaskan dan

signifikan bagi kaum perempuan itu sendiri. Peran perempuan dalam aktivitas publik dan turut serta dalam menentukan kebijakan pembangunan saat ini sudah mendapatkan porsi yang seimbang dengan laki-laki. Ditingkat masyarakat, peran perempuan mulai bangkit dalam berbagai program pembangunan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terlihat adanya berbagai kemajuan yang dicapai oleh kaum perempuan di berbagai bidang pembangunan. Namun bila dibandingkan dengan laki-laki masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tersebut. Upaya yang harus dilakukan guna mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan. Perlu didukung oleh perilaku saling menghargai atau saling menghormati, saling membutuhkan, saling membantu, saling peduli dan saling pengertian antara laki-laki dan perempuan.

Banyaknya permasalahan tentang ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan serta kesetaraan gender yang berjalan masih kurang baik dalam berbagai bidang pembangunan maupun dalam hal pengambilan keputusan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Tujuan dari diterbitkannya Inpres tersebut adalah untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu Kabupaten/Kota yang menjalankan strategi pengarusutamaan gender adalah Kota Kediri. Perwujudan kebijakan yang berperspektif pada kesetaraan gender adalah inisiatif pemerintah Kota Kediri untuk membuat suatu program guna meminimalisir angka kemiskinan, pemerataan pembangunan dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Kediri. Salah satu program yang dibuat adalah Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS). PRODAMAS tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan sosial kemasyarakatan.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Kota Kediri memerlukan partisipasi aktif dari semua elemen, karena program ini adalah Program yang *Bottom Up Planning* atau Pembangunan yang direncanakan dari bawah dengan masyarakat sebagai “subyek”, bukan sebagai “obyek” pembangunan. Program Pemberdayaan Masyarakat

(PRODAMAS) adalah program dari rakyat dan kembali ke rakyat, sehingga kunci utama keberhasilan khususnya adalah pada tahap perencanaan, dimana pada tahap perencanaan yang dibuat harus benar-benar melibatkan warga, terutama dalam proses pengajuan usulan. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya terletak pada proses perencanaan saja, melainkan juga pada pelaksanaan, memanfaatkan hasil dan juga evaluasi.

Salah satu permasalahan utama dalam suatu pembangunan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran perempuan untuk terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan. Dalam seluruh tahap proses pembangunan yang terlihat memiliki banyak kekurangan adalah pada tahap perencanaan. Perempuan mempunyai peranan yang strategis dalam menginspirasi kepentingannya melalui berbagai forum yang diadakan baik ditingkat kota maupun kelurahan. Berdasarkan data hasil observasi awal pada November 2016 menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) didominasi oleh kaum perempuan sebagaimana pernyataan salah satu staff kelurahan sebagai berikut:

“kebanyakan yang menjadi masalah ya perempuan mbak. Ibu-ibunya dan remajanya masih kurang ikut kurang semangat . Padahal ini program tujuannya untuk

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan teori dalam bidang Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam pengembangan Teori Partisipasi yang terus berkembang khususnya tentang perempuan agar perkembangan pembangunan menjadi lebih baik lagi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan pelajaran yang berguna bagi peneliti dan mahasiswa lainnya untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai partisipasi perempuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Dan juga diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya yang serupa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Kelurahan Banjar Melati untuk selanjutnya dapat diambil tindakan korektif perbaikan dan peningkatan partisipasi khususnya perempuan apabila ditemukan kekurangan pada pelaksanaan pembangunannya.

mereka juga. Perempuannya diwilayah kelurahan ini masih belum menyadari pentingnya mereka dalam rebug.”

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk meneliti partisipasi perempuan pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur. Sehingga dapat memberikan masukan untuk diambil tindakan korektif dan peningkatan partisipasi perempuan apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan programnya. Penelitian ini dianggap penting mengingat partisipasi perempuan sangat penting dalam setiap proses pembangunan termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui partisipasi perempuan pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yakni partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*), partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*), partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefit*) dan partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Kajian Gender

Gender sejak dua dasa warsa terakhir telah menjadi bahasa yang memasuki setiap analisis sosial dan menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial serta menjadi topik penting dalam setiap perbincangan mengenai pembangunan. Isu mengenai gender menjadi perhatian dunia bahkan muncul dalam agenda PBB. Konferensi Internasional PBB diselenggarakan guna membahas isu-isu yang dianggap mendesak dan konferensi ini mengandung makna politis yang penting karena melibatkan semua negara di dunia dan berfokus pada masalah yang menjadi perhatian dunia seperti HAM, lingkungan hidup, pembangunan sosial dan perempuan (Handayani dan Sugiarti, 2008: 2).

Perbedaan antara Gender dan Seks (Jenis

Kelamin)

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenar-benarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu 'gender'. Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan pengertian antara *sex* dan *gender*. Seringkali gender dipersamakan dengan seks

(jenis kelamin- laki-laki dan perempuan). Setelah sekian lama terjadi proses pembagian peran dan tanggung jawab terhadap kaum laki-laki dan perempuan yang telah berjalan bertahun-tahun bahkan berabad-abad maka sangat sulit membedakan pengertian antara seks (laki-laki dan perempuan) dengan gender (Nugroho, 2008: 1).

Untuk mengetahui konsep gender maka pertama-tama harus dapat membedakan antara kata gender dengan seks (jenis kelamin). Istilah '*gender*' pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) dalam Nugroho (2008:4) yaitu:

“untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis . Artinya gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Dengan demikian, gender dapat berubah dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis akan tetap tidak dapat berubah”.

Pembahasan mengenai gender dikenal dengan adanya dua teori yaitu teori *nurture* dan teori *nature*. Menurut teori *nurture* perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan perannya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan menurut teori *nature*, perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat yang harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan tugas yang berbeda secara kodrat alamiahnya (Budiman, 1985: 2).

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu bentuk sosial yang bukan bawaan dari lahir, melainkan dapat terbentuk tergantung dari tempat, waktu, budaya, status sosial, agama, politik, dan lain-lain. Jadi gender bukanlah kodrat dari Tuhan, melainkan buatan manusia yang dapat berubah dan dipertukarkan. Sedangkan seks (jenis kelamin) merupakan bawaan dari lahir dan sudah merupakan kehendak dari Tuhan.

Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Guna memahami bagaimana perbedaan gender telah berakibat pada ketidakadilan gender, dapat dipahami melalui beberapa manifestasi ketidakadilan. Menurut Nugroho (2008: 10-18) macam-macam manifestasi ketidakadilan adalah sebagai berikut:

a. Marginalisasi

Kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan Negara merupakan akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, diantaranya adalah penggusuran, bencana alam dan lain-lain. Sedangkan bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi pada kaum perempuan adalah disebabkan oleh gender. Meskipun tidak setiap bentuk marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipermasalahkan adalah bentuk marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender.

Perbedaan gender ini sebagai akibat dari beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme dan proses marginalisasi kaum perempuan. Sumber perbedaan gender ini jika ditinjau lebih dalam lagi berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, keyakinan tradisi, kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Bentuk marginalisasi kaum perempuan juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan Negara.

b. Subordinasi

Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional atau irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin.

Proses subordinasi yang disebabkan karena gender terjadi dalam segala macam bentuk dan mekanisme yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dalam kehidupan di masyarakat, rumah tangga, dan bernegara, banyak kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan.

c. Stereotipe

Pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu disebut dengan stereotip. Akibat yang ditimbulkan oleh adanya stereotip adalah munculnya diskriminasi dan berbagai macam ketidakadilan. Salah satu bentuk stereotip ini adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali bentuk stereotip yang terjadi di masyarakat yang lebih banyak dilekatkan pada kaum perempuan sehingga berakibat menyulitkan,

membatasi, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan.

d. Kekerasan

Kekerasan merupakan invasi atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Bentuk dari kekerasan ini seperti pemerkosaan, pemukulan hingga pada bentuk yang lebih halus lagi seperti pelecehan dan penciptaan ketergantungan. Kekerasan terhadap perempuan banyak sekali karena adanya stereotip gender (pelabelan).

e. Beban Kerja

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibanding kaum laki-laki. Dengan demikian perempuan sebenarnya merupakan korban dari bias gender di masyarakat. Beban kerja yang diakibatkan dari bias gender tersebut kerap kali diperkuat dan disebabkan oleh adanya keyakinan atau pandangan masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibanding dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki.

Dari uraian-uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa manifestasi ketidakadilan gender ini telah ada dan mengakar mulai dari keyakinan pada individu-individu, keluarga hingga negara yang bersifat global. Semua manifestasi ketidakadilan gender memang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manifestasi ketidakadilan itu tertanam dan tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan yang akhirnya semakin tahun akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya akan diyakini bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan suatu kodrat. Struktur dan sistem ketidakadilan gender yang diterima lambat laun akan mulai tercipta dan tidak akan lagi dirasakan ada sesuatu yang salah.

Kesetaraan Dan Keadilan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender menjadi hal yang sangat penting karena dapat menjadi upaya untuk menghilangkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Sehingga antara perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai akses untuk dapat berperan secara maksimal baik sebagai pelaku maupun penikmat pembangunan. Kesetaraan dan keadilan gender Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah, kesetaraan dan keadilan

gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki. Artinya tidak ada salah satu pihak (laki-laki ataupun perempuan) yang memiliki akses untuk didahulukan atau diistimewakan.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan yang adil terhadap kaum laki-laki dan kaum perempuan guna memperoleh akses, peluang, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Sehingga tidak ada suatu diskriminasi pada salah satu kaum (baik laki-laki maupun perempuan).

Pendekatan Perempuan, Gender dan Pembangunan

Pada akhir abad ke-20, semua pendekatan yang berfokus pada perempuan telah digabungkan ke dalam pendekatan gender dan pembangunan (*Gender And Development (GAD)*). Kate Young berpendapat bahwa terdapat sedikit kemiripan dengan perumusan awal *Gender And Development (GAD)* dan bahwa istilah gender seringkali dijadikan sebagai persamaan saja untuk perempuan. Studi tentang maskulinitas dan laki-laki merupakan bagian dari pembahasan dalam *Gender And Development (GAD)* saat ini. Hal tersebut dikarenakan studi tentang maskulinitas dan laki-laki memiliki pengaruh bagi kebijakan *Gender And Development (GAD)* dan karena kesetaraan gender masih jauh dari pencapaian (Momsen, 2010:12).

Pada tahun 1970 kebijakan pembangunan yang diarahkan pada perempuan hanya sebatas dalam konteks peran mereka sebagai istri dan ibu. Dengan fokus pada kesehatan ibu dan anak. Banyak asumsi yang menyatakan bahwa manfaat strategis ekonomi makro adalah adanya pertumbuhan ekonomi pada masyarakat miskin dan asumsi bahwa perempuan miskin akan diuntungkan karena posisi ekonomi suami mereka meningkat. Namun pada tahun 1970 Boserup menantang asumsi-asumsi itu yang menunjukkan bahwa wanita tidak selalu

mendapatkan keuntungan karena pendapatan kepala rumah tangga yang meningkat dan bahwa perempuan semakin dikaitkan dengan aspek keterbelakangan dan tradisional (Momsen, 2010:12)

Peningkatan peranan perempuan merupakan kepedulian global, namun banyak interpretasi dari para negarawan maupun para cendekiawan tentang konsep peningkatan peran perempuan yang sangat bervariasi. Lebih dari itu semua, interpretasi tentang peningkatan peran perempuan pun mengalami banyak perkembangan. Secara singkat perkembangan interpretasi peningkatan peran perempuan mengalami perkembangan sebagai berikut sebelum disatukan dalam pendekatan *Gender And Development* (GAD) (Handayani dan Sugiarti. 2008: 39-41):

1. *Women In Development*

Pada tahun 1970 muncul konsep *Women In Development*, yang merupakan strategi untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dengan menawarkan strategi pembangunan yang meletakkan perempuan sebagai aset dan sasaran, bukan sebagai beban pembangunan. Hal ini antara lain dilakukan dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan perempuan, memperbaiki kemampuan perempuan untuk mengatur rumah tangga, mengintegrasikan perempuan dalam proyek, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan meningkatkan kesehatan, pendapatan atau sumber daya. Pendekatan WID berpijak dari dua sasaran yaitu:

- a. Pentingnya prinsip egalitarian, oleh karena itu dalam WID antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama sebagai mitra sejajar.
- b. WID menitikberatkan pada pengadaan program yang dapat mengurangi diskriminasi yang dialami oleh para perempuan disektor produksi. Selain itu masih kuatnya anggapan bahwa peran-peran produktif hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki, sedangkan perempuan kurang dilibatkan karena kedudukan perempuan ada pada sektor domestik bukan produktif.

Women In Development (WID) lebih mengarahkan pada upaya-upaya terhadap peran perempuan agar lebih terintegrasikan dalam pembangunan. Pendekatan ini tidak mempermasalahkan mengapa perempuan selalu berada di belakang atau pada posisi subordinasi laki-laki. Upaya ini memang dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan namun dalam strategi WID ini kurang menaruh perhatian pada fungsi reproduksi perempuan.

2. *Women And Development*

Tahun 1980 muncul konsep *Women And Development* (WAD), konsep ini menggantikan

konsep *Women In Development* (WID) karena dalam pendekatan WID lebih menekankan terintegrasikannya perempuan dalam pembangunan, maka dalam WAD lebih mengarah pada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan. Jadi, setelah *Women In Development* (WID) terimplementasi kemudian beralih pada bagaimana hubungan atau keterkaitan antara perempuan dan proses pembangunan. Dalam *Women And Development* (WAD), tidak membahas letak kedudukan laki-laki dan perempuan karena sudah ada pemahaman bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan, kesempatan dan peran yang sejajar.

Pendekatan *Women And Development* (WAD) lebih kritis daripada pendekatan *Women In Development* (WID), tetapi pendekatan WAD ini kurang bisa menjawab hubungan patriarkhi yang terjadi dalam masyarakat. *Women And Development* (WAD) akan berhasil menaikkan peran perempuan apabila ditunjang oleh struktur politik yang lebih stabil dan merata, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Implementasi pendekatan *Women And Development* (WAD) dititikberatkan pada pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan tanpa memperhatikan unsur waktu yang digunakan oleh perempuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berada diluar tugas dan tanggungjawab unsur domestik. Kegiatan domestik berada di luar jalur yang sebelumnya perempuan sebagai obyek kali ini perempuan menjadi subyek dalam pembangunan. *Women In Development* (WID) dan *Women And Development* (WAD) memiliki beberapa kesamaan salah satunya adalah sama-sama dalam kerangka ekonomi dan politik negara. Namun kesalahan konsep *Women And Development* (WAD) ini adalah tidak memasukkan unsur laki-laki dalam pembangunannya. Oleh karena itu konsep ini dirasa masih kurang sempurna dan perlu perbaikan lagi kedepannya agar benar-benar terjadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu pembangunan.

3. *Gender And Development*

Tahun 1990 dikembangkan konsep *Gender And Development* (GAD), konsep ini menggabungkan unsur laki-laki dan perempuan di dalam pembangunan. Pendekatan GAD secara implementatif cenderung mengarah pada adanya komitmen pada perubahan struktural. Oleh sebab itu, pelaksanaan GAD memerlukan dukungan sosio-budaya masyarakat dalam politik nasional yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki. GAD tidak mungkin terlaksana apabila dalam politik

suatu Negara masih menempatkan perempuan dalam posisi yang inferior dan subordinatif.

Dengan demikian kajian tentang gender dalam suatu pembangunan merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan karena di dalam pembangunan, perempuan juga merupakan subyek yang seharusnya dilibatkan juga dalam pembangunan dan bukan hanya sebagai obyek saja, baik itu dalam prosesnya maupun manfaatnya. Sehingga dengan demikian akan tercipta kesetaraan dan keadilan gender yang menjadi hal penting karena hal tersebut dapat menjadi upaya untuk menghilangkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga antara perempuan dengan laki-laki sama-sama mempunyai akses untuk dapat berperan secara maksimal baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima pembangunan.

Partisipasi

Arti penting partisipasi pada intinya adalah terletak pada fungsinya. Fungsi dari partisipasi yang pertama adalah sebagai suatu sarana swa edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik. Dalam fungsi ini, partisipasi tidak akan mengancam stabilitas politik dan seharusnya berjalan di semua jenjang pemerintahan. Fungsi lain dari partisipasi adalah sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan.

Arti penting partisipasi juga dapat dilihat dari manfaatnya dalam meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada kepentingan dan pengetahuan riil yang ada di dalam masyarakat. Partisipasi juga bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan suatu keputusan yang telah dibuat. Komitmen ini merupakan modal utama bagi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Mengingat fungsi dan manfaat yang dapat diperoleh darinya, kini partisipasi tidak lagi dapat dipandang sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah tetapi justru sebagai hak-hak masyarakat. Partisipasi dapat dianggap sebagai layanan dasar dan bagian integral dari *local governance* (Muluk, 2007:6).

Menurut Sumaryadi (2010: 46) partisipasi berarti:

“peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi juga merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan

perasaan pihak lain. Partisipasi berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan dalam satu pembangunan sehubungan dengan kehidupan masyarakat. Partisipasi merupakan kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan”.

Menurut Solekhan sendiri (2014: 144) partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan secara sadar dan sukarela untuk berkontribusi secara fisik maupun non-fisik dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan secara aktif masyarakat (seseorang) maupun kelompok dalam suatu kegiatan yang tidak berdasarkan paksaan, melainkan berdasarkan kesukarelaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Partisipasi sangat penting untuk dilakukan karena *pertama*, partisipasi merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat (tanpa adanya partisipasi, suatu program pembangunan akan gagal); *kedua*, dengan adanya partisipasi masyarakat akan merasa lebih dilibatkan dalam setiap proses pembangunan sehingga masyarakat akan mempunyai rasa memiliki terhadap suatu proyek pembangunan yang dilakukan dan yang *ketiga*, partisipasi merupakan suatu hak masyarakat untuk dilibatkan secara langsung dalam pembangunan mereka sendiri.

Bila dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, maka partisipasi yang dimaksudkan disini adalah keikutsertaan, kehadiran dan partisipasi perempuan dalam berbagai proses pembangunan. Dengan fokus pada semua tahap pembangunan yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan, menerima hasil dan evaluasi, maka peneliti melihat keikutsertaan, kehadiran maupun partisipasi perempuan dalam semua tahap Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS).

Level Partisipasi Masyarakat

Untuk menilai derajat partisipasi masyarakat maka Sherry R. Arnstein (1969) dalam teorinya “*Eight Rungs on The Ladder of Citizen Participation*” mengungkapkan bahwa “partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan *corresponding to the extent of citizen power in determining the plan*

and/or program.” Secara umum dalam model ini terdapat tiga derajat partisipasi yaitu :

1. Tidak partisipatif
2. Derajat semu
3. Kekuatan masyarakat

Tabel 1.2 Level Partisipasi Menurut Arnstein

8	Kendali Warga (<i>Citizen Control</i>)	Derajat Kuasa / Kekuatan Masyarakat (<i>Degree of Citizen Power</i>)
7	Kuasa yang didelegasi (<i>Delegated Power</i>)	
6	Kemitraan (<i>Partnership</i>)	
5	Penentruman (<i>Placation</i>)	Partisipasi semu (<i>Tokenism</i>)
4	Konsultasi (<i>Consultation</i>)	
3	Pemberian informasi (<i>Information</i>)	
2	Terapi (<i>Therapy</i>)	Tidak Partisipatif (<i>Non Participation</i>)
1	Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	

Sumber : Dipublikasikan pertama kali dalam Arnstein, R. Sherry, “A Ladder of Citizen Participation”, JAIP Vol. 35, No. 4, Juli 1969, hal. 216-224.

Arnstein mengelompokkan delapan anak tangga tadi menjadi tiga bagian.

1. Bagian kesatu, Non participation (Tidak Ada Partisipasi) berjenjang dari Manipulation dan Therapy. Pada bagian ini, otoritas yang berkuasa sengaja menghapus segala bentuk partisipasi publik. Di level Manipulation, mereka memilih dan mendidik sejumlah orang sebagai wakil dari publik. Fungsinya, ketika mereka mengajukan berbagai program, maka para wakil publik tadi harus selalu menyetujuinya. Sedangkan publik sama sekali tidak diberitahu tentang hal tersebut. Pada level Therapy, mereka sedikit memberitahu kepada publik tentang beberapa programnya yang sudah disetujui oleh wakil publik. Publik hanya bisa mendengarkan.
2. Bagian kedua, Tokenism (Delusif) yang memiliki rentang dari Informing, Consultation dan Placation. Dalam Tokenism, otoritas yang berkuasa menciptakan citra, tidak lagi menghalangi partisipasi publik. Kenyataannya berbeda. Benar partisipasi publik dibiarkan, namun mereka mengabaikannya. Mereka tetap mengeksekusi rencananya semula. Ketika berada di level Informing mereka menginformasikan macam-macam program yang akan dan sudah dilaksanakan. Namun

hanya dikomunikasikan searah, publik belum dapat melakukan komunikasi umpan-balik secara langsung. Untuk level Consultation, mereka berdiskusi dengan banyak elemen publik tentang berbagai agenda. Semua saran dan kritik didengarkan. Tetapi mereka yang kuasa memutuskan, apakah saran dan kritik dari publik dipakai atau tidak. Lalu pada level Placation, mereka berjanji melakukan berbagai saran dan kritik dari publik. Namun janji tinggal janji, mereka diam-diam menjalankan rencananya semula.

3. Bagian ketiga Citizen Power (Publik Berdaya). Saat partisipasi publik telah mencapai Citizen Power, maka otoritas yang berkuasa sedang benar-benar mendahulukan peran serta publik dalam berbagai hal. Saat tiba di level Partnership, mereka memperlakukan publik selayaknya rekan kerja. Mereka bermitra dalam merancang dan mengimplementasi aneka kebijakan publik. Naik ke level Delegated Power, mereka mendelegasikan beberapa kewenangannya kepada publik. Contoh, publik punya hak veto dalam proses pengambilan keputusan. Level tertinggi yaitu Citizen Control. Publik yang lebih mendominasi ketimbang mereka. Bahkan sampai dengan mengevaluasi kinerja mereka. Partisipasi publik yang ideal tercipta di level ini.

Bentuk-Bentuk Partisipasi

Menurut Ndraha (1990:103-104) bentuk atau tahap partisipasi dapat dibagi menjadi enam bentuk/tahap yaitu :

- a. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial;
- b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya;
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan;
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan;
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan; dan
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan

masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pendapat lain mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat disampaikan oleh Cohen dan Uphoff (dalam Solekhan, 2014:10) terdiri dari empat bentuk yaitu :

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*)

Merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan untuk menilai suatu program atau rencana yang akan ditetapkan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*)

Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat yang dilihat dari jumlah atau banyaknya yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang diparticipasikan, misalnya tenaga, uang, bahan, semuanya, atau sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-kali atau berulang-ulang.

3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefit*)

Partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerataan kesejahteraan dan fasilitas, pemerataan usaha dan pendapatan, ikut menikmati atau menggunakan hasil-hasil pembangunan (jalan, jembatan, air minum, gedung dan berbagai sarana dan prasarana sosial) adalah bentuk dari partisipasi dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*)

Adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai dan mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya dengan memberikan saran-saran, kritikan, dan protes.

Prinsip Dasar Pengembangan Partisipasi

Pengertian partisipasi itu mengandung sesuatu yang bergerak dinamis dalam suatu proses perkembangan. Akan tetapi dalam pengembangan partisipasi masyarakat itu setidaknya-tidaknya ada beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Beberapa prinsip dasar tersebut menurut Solekhan (2014) diantaranya adalah:

a. Kebersamaan

Setiap individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat, bertindak dalam mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. Pelembagaan partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai elemen, baik struktural maupun kultural, secara vertikal maupun horizontal. Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan rencana, pengorganisasian dan pengendalian dalam penyelenggaraan suatu kegiatan.

b. Tumbuh dari bawah

Partisipasi itu bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas kebawah (*top down*) atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan. Partisipasi itu tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang diasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu prakarsa dan inisiatif harus muncul dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat.

c. Kepercayaan dan keterbukaan

Kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar saling percaya dan keterbukaan. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi bergerak, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat. Karena itu partisipasi itu menuntut hubungan yang lebih terbuka antara pejabat pemerintahan dan masyarakat.

Prinsip merupakan suatu pernyataan yang sangat fundamental atau merupakan suatu kebenaran yang dijadikan sebagai pedoman untuk berpikir atau bertindak. Pencapaian yang ingin dicapai dari adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan, yaitu dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Dengan mengamalkan prinsip-prinsip partisipasi diatas, maka seluruh program pembangunan yang hendak dilakukan akan dapat berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip partisipasi mengedepankan semua elemen yang dapat berdampak positif terhadap suatu pembangunan. Salah satunya adalah kesetaraan, dimana hal tersebut

berarti harus ada keseimbangan dan kesejajaran antara peran laki-laki dan perempuan tanpa ada yang tersisihkan.

Partisipasi Perempuan dalam Program Pembangunan

Partisipasi perempuan sudah menjadi elemen yang sangat penting dalam suatu pembangunan. Partisipasi dari perempuan merupakan tonggak awal keberhasilan pembangunan. Dengan partisipasi perempuan, maka arah pembangunan akan lebih maju dan adil. Sama halnya dengan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) yang merupakan salah satu program pembangunan yang ada di Kota Kediri yang membutuhkan partisipasi dari masyarakat (laki-laki dan perempuan). Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) tidak akan berjalan apabila tidak mendapat respon dari masyarakat. Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), keterlibatan perempuan sangat dibutuhkan untuk mengikuti perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan program tersebut.

Sebelum pada tingkat realisasi kebutuhan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS), pertama diadakan rembug warga (pra-musrenbang) yang kemudian menghasilkan prioritas kebutuhan yang akan direalisasikan terlebih dahulu. Melalui rembug warga bisa muncul kebutuhan dari tingkat RT yang utama, setelah itu dilakukan musyawarah tingkat kelurahan. Setelah melalui musyawarah kelurahan, kemudian akan dimusyawarahkan lagi pada tingkat yang lebih atas yaitu kecamatan, dan kota. Setelah proses perencanaan, dilanjutkan pada proses pelaksanaan, menerima manfaat serta evaluasi. Keseluruhan tahap pembangunan tersebut membutuhkan partisipasi dari perempuan.

Partisipasi yang melibatkan perempuan secara terus menerus mulai dari perencanaan hingga evaluasi akan berdampak pada pembangunan itu sendiri dan juga berdampak pada individu-individu yang terlibat. Partisipasi perempuan dalam program pembangunan adalah keikutsertaan secara sukarela kaum perempuan dalam suatu program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup dan kompetensi masing-masing.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik *Purposive*. Dalam mengkaji partisipasi perempuan pada program pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur digunakan empat bentuk partisipasi yakni partisipasi

dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*), partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*), partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefit*) dan partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Pembahasan

Untuk mengetahui dan menggambarkan partisipasi perempuan pada program pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur satu atap Kalimas maka peneliti menjabarkannya ke dalam empat bentuk partisipasi yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*), partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*), partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefit*) dan partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan menurut Cohen dan Uphoff (dalam Solekhan 2014:10) adalah

partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan untuk menilai suatu program atau rencana yang akan ditetapkan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Partisipasi dalam pembuatan keputusan terjadi pada proses perencanaan atau rembug yang dilakukan oleh semua warga. Dalam kaitannya dengan fokus penelitian yaitu partisipasi perempuan, maka penelitian ini melihat keikutsertaan perempuan dalam pembuatan keputusan dan dalam mengemukakan pendapatnya pada acara rembug yang dilakukan di masing-masing RT Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.

Berdasarkan berbagai pemaparan pada penyajian data, dapat diketahui bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) belum semua berpartisipasi hadir secara fisik dalam proses pengambilan keputusan, namun meskipun kehadiran secara fisik masih kurang, kehadiran perempuan secara non-fisik melalui ide-ide yang disampaikan kepada beberapa perwakilan perempuan yang hadir dalam rembug umum telah mewakili seluruh perempuan. Perempuan memang tidak hadir secara fisik dalam rembug RT.

Namun mereka sebelumnya sudah melakukan arisan khusus perempuan, dimana acara tersebut lebih banyak menarik perhatian. Hal tersebut dikarenakan dalam arisan hanya dihadiri perempuan saja dan terdapat acara lainnya seperti undian arisan, sehingga minat perempuan menjadi tinggi. Dalam arisan khusus perempuan tersebut, semua perempuan mengeluarkan keluhannya dan idenya. Untuk dikirim beberapa perwakilan saja yang akan menghadiri rembug RT bersama warga laki-laki lainnya.

Seluruh ide yang diberikan oleh perwakilan perempuan merupakan ide dari perempuan lain yang tidak menghadiri rembug. Alasan banyaknya perempuan yang tidak bisa menghadiri rembug adalah keterbatasan waktu. Waktu yang digunakan untuk rembug menurut ibu-ibu adalah waktu yang digunakan untuk mengurus anak dan suami mereka dirumah, selain itu alasan malu untuk berbicara didepan umum juga menjadi kendala minimnya kehadiran fisik perempuan dalam rembug. Namun berdasarkan temuan yang ada dilapangan, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan program, tahun ini peserta perempuan sudah sedikit meningkat kehadirannya, bahkan mereka yang hadir menyumbangkan ide-ide yang cukup bagus untuk perkembangan wilayahnya.

Dalam upaya peningkatan kehadiran fisik perempuan, pihak Kelurahan maupun pihak RT setempat telah melakukan berbagai upayanya, salah satunya yaitu sosialisasi dan undangan dari pintu ke pintu. Telah dilakukan beberapa kali sosialisasi kepada seluruh warga agar mau untuk menghadiri rapat pada tahap perencanaan atau pengambilan keputusan pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di masing-masing RT. Serta adapula yang melakukan inovasi dengan memberikan undangan dari pintu ke pintu setiap akan dilakukan rembug. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak terkait bertujuan agar kehadiran fisik perempuan dapat meningkat. Dan upaya tersebut setidaknya sudah membuahkan hasil, tahun ini kehadiran perempuan sudah sedikit meningkat, dan pencapaian lainnya yaitu kemampuan perempuan untuk berpikir juga semakin membaik, ide-ide yang diberikan semakin kreatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dalam proses pengambilan keputusan lewat rembug di masing-masing RT diketahui bahwa perempuan sudah cukup baik dan cukup berani dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

dalam penyampaian prioritas kebutuhannya maupun ide-idenya. Namun masih memerlukan perbaikan yang lebih baik lagi untuk kehadiran fisiknya. Yang mana belum keseluruhan perempuan hadir dalam rembug. Pencapaian tersebut diharapkan bisa semakin ditingkatkan lagi seiring dengan perkembangan pembangunan yang semakin pesat.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan (*participation in implementation*)

Partisipasi dalam pelaksanaan menurut Cohen dan Uphoff (dalam Solekhan 2014:10) adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat yang dilihat dari jumlah atau banyaknya yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang diparticipasikan, misalnya tenaga, uang, bahan, semuanya, atau sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi,sekali-kali atau berulang-ulang. Dalam kaitannya dengan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) peneliti melihat keikutsertaan perempuan dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan kebutuhan yang di ditetapkan dalam rembug. Bentuk partisipasi perempuan dalam pelaksanaan program ini adalah partisipasi tenaga, uang, waktu maupun pikiran.

Berdasarkan penyajian data yang telah disajikan sebelumnya diketahui bahwa perempuan di Kelurahan Banjar Melati sangat aktif dalam membantu proses pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung. Partisipasi perempuan di Kelurahan Banjar Melati tidak hanya hadir dalam bentuk tenaga dan waktu, tapi juga pikiran dan uang. Uang yang dimaksudkan di sini adalah uang sukarela yang dikeluarkan oleh perempuan untuk membeli makanan maupun minuman yang akan di berikan kepada pekerja yang mana yang mendominasi adalah warga sekitar sendiri. Untuk partisipasi berupa waktu, perempuan cukup pandai dalam mengaturnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan seringkali terjadi konflik kecil. Namun konflik itu dengan mudah dan cepat terselesaikan. Dalam menyelesaikan konflik, masyarakat biasanya melakukan dengan jalan musyawarah. Konflik memang selalu hadir dalam setiap proses pembangunan. Namun konflik tersebut merupakan suatu kewajaran, karena pada proses

pelaksanaan pembangunan menghadirkan partisipasi dari seluruh individu yang ada. Oleh sebab itu menyatukan pikiran masing-masing individu memang tidak mudah. Namun ketidakmudahan itu bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di dapatkan hasil bahwa partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati Kota Kediri sudah sangat bagus. Meskipun dalam pelaksanaan pengambilan keputusan kehadiran perempuannya secara fisik masih rendah dibanding laki-laki, namun dalam hal pelaksanaan pembangunan perempuan lebih aktif dan kehadiran secara fisiknya lebih banyak. Dengan kehadiran perempuan yang cukup banyak dalam proses pelaksanaan pembangunan di lapangan serta kehadiran perempuan yang tidak hanya terjadi pada awal pelaksanaan saja melainkan terjadi secara terus-menerus hingga akhir pelaksanaan membuat pembangunan semakin cepat terselesaikan.

3. Partisipasi dalam Menerima Manfaat (*participation in benefit*)

Partisipasi dalam menerima manfaat menurut Cohen dan Uphoff (dalam Solekhan 2014:10) adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerataan kesejahteraan dan fasilitas, pemerataan usaha dan pendapatan, ikut menikmati atau menggunakan hasil-hasil pembangunan (jalan, jembatan, air minum, gedung dan berbagai sarana dan prasarana sosial) adalah bentuk dari partisipasi dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Dalam kaitannya dengan fokus penelitian yaitu partisipasi perempuan dalam menerima manfaat pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri yaitu melihat partisipasi perempuan dalam menikmati dan memanfaatkan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi perempuan tidak hanya berhenti dengan melihat perempuan menikmati dan memanfaatkan hasil pembangunan saja, melainkan juga melihat tanggung jawab yang dilakukan perempuan dalam merawat sarana ataupun prasarana yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di lapangan. Perempuan sangat aktif dan sesuai dengan batas wajar dalam memanfaatkan dan

menikmati hasil pembangunannya. Dalam hal pemberian ide pembelian alat *catering* misalnya, ide tersebut digagas oleh perempuan, yang membeli perempuan, dan yang merawat juga perempuan. Alat-alat *catering* tersebut bisa untuk disewakan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Hanya dengan membayar uang kas secara sukarela, masyarakat bisa menikmati fasilitas tersebut. Namun persewaan tersebut tidak lepas dari syarat-syarat yang mana salah satu diantaranya adalah mengembalikan alat tersebut sesuai dengan kondisi awal peminjaman. Jika ada kekurangan maka akan dimintai pertanggung jawaban kepada yang meminjam. Tidak hanya dalam hal persewaan alat-alat masak. Dalam hal pemberian ide misalkan pembuatan pos penyimpanan barang-barang RT seperti kursi, *sound system*, gerobak dan lain sebagainya ketika sudah direalisasikan maka warga juga bergotong royong memanfaatkan dan menikmati hasilnya. Akan tetapi warga juga tidak lepas dari tanggung jawab untuk menjaga dan merawat dengan baik agar barang yang ada di dalamnya juga bisa terjaga kebersihan dan bisa dipakai jangka panjang.

Pelaksanaan pembangunan yang berhasil akan menghasilkan pula sarana maupun prasarana yang bagus dan akan membawa dampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan. Perempuan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan akan merasa sangat bangga apabila fasilitas hasil pelaksanaan pembangunan di manfaatkan sebaik mungkin. Dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang lengkap akan meningkatkan pula produktifitas perempuan. Dengan demikian maka pendapatan perempuan dan kehidupan perempuan akan lebih berkembang baik lagi.

Keberhasilan yang dicapai oleh perempuan saat ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi kedepannya. Karena keberhasilan perempuan saat ini masih mempunyai banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan ke depan bertujuan untuk lebih meningkatkan kompetensi, kreatifitas dan tanggung jawab perempuan dalam setiap proses pembangunan.

4. Partisipasi dalam Evaluasi (*participation in evaluation*)

Partisipasi dalam evaluasi menurut Cohen dan Uphoff (dalam Solekhan 2014:10) adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai dan mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut

serta dalam mengawasi dan menilai. Serta penilaian secara tidak langsung, misalnya dengan memberikan saran-saran, kritikan, dan protes.

Fokus penelitian ini adalah partisipasi perempuan dalam evaluasi pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Evaluasi yang dimaksudkan disini adalah keikutsertaan perempuan dalam menilai dan mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya yang dilakukan secara informal.

Berdasarkan penyajian data diatas dapat diketahui bahwa partisipasi perempuan dalam evaluasi pembangunan pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) sudah sangat baik. Semua perempuan turut andil dalam memberikan saran dan penilaian. Evaluasi terjadi tidak hanya pada akhir tahap pembangunan, tetapi evaluasi terjadi pada setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga menerima hasil. Evaluasi yang terjadi disini adalah perempuan aktif dan bijak dalam menyampaikan kritikan dan saran yang menurutnya benar dan memang terjadi kesalahan dalam pengimplementasiannya. Perempuan sangat kritis menilai jalannya pembangunan bagi wilayahnya. Hal tersebut dikarenakan perempuan adalah manusia yang sangat berperasaan dan peka terhadap berbagai kondisi. Dengan demikian penilaian yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung oleh perempuan membawa dampak yang sangat baik bagi jalannya proses pembangunan.

Perempuan tidak hanya menilai dengan asal, namun mereka memperhatikan kondisi yang benar dan yang salah. Selain melakukan penilaian atas kegiatan pembangunan, perempuan juga melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh perempuan mulai dari pelaksanaan hingga menerima hasil. Pada saat pelaksanaan selain perempuan terjun langsung dalam kegiatan, perempuan juga turut mengawasi jalannya kegiatan tersebut. Apabila terjadi penyelewengan, maka perempuan akan bertindak cepat dan tegas. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya protes yang diberikan oleh perempuan pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya. Tidak hanya protes dengan kesalahan teknis, perempuan juga seringkali melakukan protes terhadap individu lainnya yang kurang bisa bekerjasama dengan yang lain. Pengawasan yang dilakukan perempuan seperti di atas dilakukan

guna mencapai tujuan pembangunan dengan cepat dan baik.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa partisipasi perempuan dalam evaluasi pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) dilakukan dengan sangat baik. Meskipun masih ada beberapa perempuan yang berperilaku kurang terpuji bahkan kurang peduli dan melimpahkan semua tanggung jawabnya kepada laki-laki, namun hal tersebut dapat di selesaikan dengan baik oleh masyarakat. Partisipasi perempuan yang terjadi dalam evaluasi pembangunan ini berupa penilaian dan pengawasan atas jalannya pembangunan. Dan pengawasan yang dilakukan oleh perempuan sangat baik. Penilaian yang diberikan oleh perempuan juga sangat baik. Banyak saran dan masukan yang muncul dari proses penilaian dan pengawasan yang dilakukan oleh perempuan dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian hasil temuan data di lapangan tersebut, maka yang dilakukan oleh masyarakat khususnya perempuan Kelurahan Banjar Melati tersebut sudah bisa dikatakan sebagai partisipasi. Karena menurut Sumarto (2004:17) yang memberikan definisi partisipasi yaitu sebagai “proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”. Pendapat tersebut menggambarkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam segala aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan ataupun dalam hal pemantauan atau pengawasan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penemuan di lapangan mengenai partisipasi perempuan pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati Kota sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan sehingga perlu adanya upaya yang lebih baik lagi dalam memperbaiki partisipasi perempuan. Hal ini dapat dilihat dari empat bentuk partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (dalam Solekhan, 2014: 10) sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*)

Partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan pada Program Pemberdayaan masyarakat

(PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sudah cukup baik. Keputusan yang dihasilkan tidak hanya berasal dari laki-laki saja, tetapi juga merealisasikan berdasarkan masukan dari perempuan. Pembuatan keputusan dalam program ini terjadi pada saat rembug warga atau perencanaan di tingkat RT. Yang menjadi kekurangan dalam hal pengambilan keputusan atau perencanaan ini adalah kehadiran fisik perempuan yang masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan yang hadir dalam rembug hanya perwakilan saja yang sebelumnya telah melakukan kegiatan arisan khusus perempuan. Namun menurut penuturan beberapa informan, dibandingkan tahun sebelumnya, tahun ini kehadiran perempuan sudah cukup meningkat, bukan hanya kehadiran fisik saja yang mulai meningkat, akan tetapi kehadiran secara ide dan kreatifitas juga. Hal tersebut dikarenakan berbagai upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan kehadiran perempuan yaitu salah satunya dengan sosialisasi dan mengundang dari pintu ke pintu.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*)

Partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan pada Program Pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sudah berjalan sangat baik. Seluruh perempuan turut andil dalam kegiatan yang dilakukan di wilayahnya. Perempuan juga ikut membantu dan bekerja terjun ke lapangan bersama dengan laki-laki. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tidak memunculkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Hal itu dikarenakan antara laki-laki dan perempuan saling bekerja sama dan berkolaborasi guna menghasilkan pembangunan yang cepat dan baik. Partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan sangat jelas terlihat dari ikutsertanya perempuan membantu kegiatan di lapangan, kegiatan yang harusnya dilakukan laki-laki juga dilakukan oleh perempuan. misalnya membawa batu batu, membawa semen dan ikut memasang tiang lampu penerangan jalan.

3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefit*)

Partisipasi perempuan dalam menerima manfaat pembangunan pada Program Pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sudah sangat baik dan bijak. Perempuan memanfaatkan dan menikmati seluruh hasil pembangunan secara

bijaksana dan tidak mengabaikan tanggung jawab untuk merawat dan menjaga seluruh sarana dan prasarana yang dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan.

4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*)

Partisipasi perempuan dalam evaluasi pembangunan pada Program Pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sudah berjalan sangat baik. Perempuan melakukan banyak penilaian dan masukan guna menjadikan pembangunan yang akan datang lebih baik lagi. Pengawasan yang dilakukan oleh perempuan berjalan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga menerima manfaat. Seluruh kegiatan tersebut diawasi dan dinilai langsung secara obyektif oleh perempuan. Jika ada penyalahgunaan atau penyelewengan dalam proses pembangunan maka perempuan tidak malu untuk memberikan masukan. Partisipasi yang dilakukan perempuan dalam evaluasi pembangunan sangat membantu penilaian atas pembangunan yang sedang dilakukan dan dapat bermanfaat bagi keberlangsungan pembangunan yang akan datang.

Secara keseluruhan partisipasi perempuan pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati sudah cukup bagus. Meskipun dalam pelaksanaan rapat atau rembug untuk menjaring partisipasi perempuan, jumlah kehadiran perempuan secara fisik masih rendah. Akan tetapi untuk kehadiran secara non fisik yaitu berupa ide dan gagasan sudah sangat bagus Partisipasi tidak hanya terjadi dalam perencanaan, namun juga dalam pelaksanaan, menerima hasil dan evaluasi. Partisipasi perempuan pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati termasuk dalam level *citizen power* (masyarakat terberdaya) yang termasuk ke dalam derajat Kekuatan Masyarakat (*Degree of Citizen Power*).

Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka peneliti memiliki beberapa saran yang dapat berguna dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam tahap perencanaan pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kelurahan Banjar Melati Kota Kediri. Saran tersebut antara lain:

1. Saran untuk pihak Kelurahan

- a) Lebih aktif lagi untuk melakukan sosialisasi kepada warga terutama perempuan agar kehadiran fisiknya dapat lebih meningkat

- b) Melakukan kunjungan secara rutin kepada wilayah yang melaksanakan rembug agar dapat memantau kehadiran masyarakatnya
- c) Melakukan kunjungan rutin untuk melihat keberlangsungan pembangunan yang dijalankan masyarakat
- d) Memaksimalkan peran pendamping PRODAMAS di masing-masing RT yaitu dengan membuka sesi untuk mengutarakan keluhan secara pribadi, tidak secara bersama-sama dalam rembug warga. Agar warga yang memang masih pemalu bisa untuk mengutarakan keinginannya secara langsung kepada pihak terkait.

2. Saran untuk pihak RT sebagai penyelenggara rembug warga

- a) Untuk meningkatkan kehadiran secara fisik khususnya para perempuan diharapkan pihak RT untuk lebih sering lagi mendatangi dari rumah ke rumah untuk memberikan undangan rembug
- b) Memodifikasi acara rembug semenarik mungkin agar dapat menarik minat warga khususnya perempuan
- c) Menyesuaikan jadwal atau waktu rapat pada jam-jam yang tepat, pada sore sebelum tiba maghrib atau pada sore hari setelah maghrib

3. Saran untuk masyarakat atau perempuan

- a) Untuk menjaring aspirasi dari perempuan, maka diharapkan perempuan mau untuk meluangkan sedikit waktunya untuk bisa hadir dalam rembug agar seluruh upaya pembangunan yang akan dilakukan bisa sesuai dengan keinginannya
- b) Meningkatkan komitmen kepada diri sendiri untuk mau hadir secara fisik dan bertanggung jawab penuh atas seluruh pembangunan yang dilakukan di wilayahnya

Daftar Pustaka

Arnstein, R. Sherry. 1969. "A Ladder of Citizen Participation". In *Journal of the American Planning Association*. Vol. 35, No. 4, pp. 216-224.

Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: PT. Gramedia.

Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2008. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.

Momsen, Janet H. 2010. *Gender And Development Second Edition*. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Moser, Caroline O.N. 1989. *Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic Gender Needs*. London School of Economics and Political Science. Vol. 17. No. 11. pp. 1799-1825.

Muluk, Khairul M.R. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem*. Malang: Bayumedia Publishing.

Ndraha, Talizuduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Siregar, I. 2001. *Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Depok: Universitas Indonesia.

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.

Sumarto, Hetifah Sj. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan dari Prespektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. CV Lintas Khatulistiwa.

Undang-Undang

Peraturan Walikota Kediri Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2015
Tentang Perubahan kedua atas Pedoman
Pelaksanaan Program Fasilitas
Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Perubahan ketiga atas Pedoman
Pelaksanaan Program Fasilitas
Pemberdayaan Masyarakat.

Inpres No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri dalam Negeri No. 132 Tahun
2003 Tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan di Daerah.

Artikel online

Panjaitan, Winda. M. 2011. Tantangan dan
Peransuasi Perempuan dalam Pembangunan.
[Diakses 19 Oktober 2017 pukul 12.30 WIB].
<http://kotaku.pu.go.id/wartaarsipdetil.asp?mid=3976&catid=2&>

Website

Tiga peran penting perempuan. [Diakses 20 Maret
2017 pukul 12.07 WIB].
<http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/635e8-profil-perempuan-indonesia-2013.pdf>
Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif.
[Diakses 19 Oktober 2017]. www.voaindonesia.com